



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA**

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 PERPUSTAKAAN  
Unit Organisasi : 2-23.2-24.0-00.01 Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Sub Unit Organisasi : 2-23.2-24.0-00.01.000 Dinas Perpustakaan dan Arsip

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.606.299.742,00	1.988.881.703,00	3.617.418.039,00	3.617.418.039,00	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.078.500.926,00	1.988.881.703,00	2.089.619.223,00	2.089.619.223,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	3.187.474.697,00	1.767.881.703,00	1.419.592.994,00	1.419.592.994,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.752.166.667,00	1.130.981.477,00	621.185.190,00	621.185.190,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.422.978.030,00	628.680.226,00	794.297.804,00	794.297.804,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.330.000,00	8.220.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	891.026.229,00	221.000.000,00	670.026.229,00	670.026.229,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	199.469.869,00	0,00	199.469.869,00	199.469.869,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	513.679.550,00	221.000.000,00	292.679.550,00	292.679.550,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	113.842.810,00	0,00	113.842.810,00	113.842.810,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	64.034.000,00	0,00	64.034.000,00	64.034.000,00	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	1.527.798.816,00	0,00	1.527.798.816,00	1.527.798.816,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	892.428.612,00	0,00	892.428.612,00	892.428.612,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	562.568.870,00	0,00	562.568.870,00	562.568.870,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	280.817.680,00	0,00	280.817.680,00	280.817.680,00	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	33.006.960,00	0,00	33.006.960,00	33.006.960,00	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	16.035.102,00	0,00	16.035.102,00	16.035.102,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	635.370.204,00	0,00	635.370.204,00	635.370.204,00	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	599.970.204,00	0,00	599.970.204,00	599.970.204,00	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(5.606.299.742,00)	(1.988.881.703,00)	(3.617.418.039,00)	(3.617.418.039,00)	
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(5.606.299.742,00)</b>	<b>(1.988.881.703,00)</b>	<b>(3.617.418.039,00)</b>	<b>(3.617.418.039,00)</b>	

Sei Rampah, 18 September 2023

**KEPALA DINAS**

ELINDA SITIANUR, SE  
NIP. 196708311989032002





# NERACA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 2 . 17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	
<b>Unit Organisasi</b> : 2 . 17 . 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 2 . 17 . 01 . 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.701.700,00	1.650.567,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.701.700,00</b>	<b>1.650.567,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.672.219.202,00	1.652.355.202,00
Gedung dan Bangunan	1.392.692.000,00	1.392.692.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.087.050,00	93.087.050,00
Aset Tetap Lainnya	1.654.340.483,00	1.644.359.883,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.302.468.500,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.916.701.849,00)	(1.723.942.489,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>11.198.105.386,00</b>	<b>3.058.551.646,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	86.870.000,00	86.870.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>86.870.000,00</b>	<b>86.870.000,00</b>

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 2 . 17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
<b>Unit Organisasi</b> : 2 . 17 . 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 2 . 17 . 01 . 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

  

URAIAN	2022	2021
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>11.286.677.086,00</b>	<b>3.147.072.213,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	11.286.677.086,00	3.147.072.213,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>11.286.677.086,00</b>	<b>3.147.072.213,00</b>



---

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan tahun 2022. disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan salah satu SKPD yang termasuk dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Dalam hal ini memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan administrasi. Karena fungsi tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan data dan informasi dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam bentuk Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan Keuangan ini diharapkan nantinya dapat dijadikan salah satu sumber data dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### **Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
30. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
31. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Perintah Kabupaten Serdang Bedagai;
32. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021.

### **Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

#### **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

##### **A. Pengelolaan Belanja Daerah**

###### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah

Belanja Daerah pada dasarnya dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Terdapat tiga elemen penting yang saling bersentuhan dalam menentukan belanja daerah yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian belanja daerah merupakan perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanannya kepada masyarakat. Namun demikian dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah diperlukan kecermatan bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan agar dapat menentukan skala prioritas yang tepat sasaran.

**B. Target, Realisasi dari Program dan Kegiatan**

URAIAN	ANGGARAN	REALIASI	%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>218.376.852,00</b>	<b>217.775.442,00</b>	<b>99,72</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.499.400,00	2.499.400,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.296.900,00	37.921.700,00	99,02
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.026.052,00	10.000.000,00	99,74
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.574.000,00	12.574.000,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.178.500,00	13.178.500,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.225.000,00	3.195.000,00	99,07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.577.000,00	138.406.842,00	99,88
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>26.750.000,00</b>	<b>23.864.000,00</b>	<b>89,21</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.750.000,00	23.864.000,00	89,21
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>477.796.000,00</b>	<b>467.501.768,00</b>	<b>97,85</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.292.000,00	2.292.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.104.000,00	36.809.768,00	78,15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428.400.000,00	428.400.000,00	100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160.867.700,00</b>	<b>155.631.540,00</b>	<b>96,75</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.720.000,00	40.686.540,00	99,92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.540.000,00	71.640.000,00	93,60
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.291.700,00	7.285.000,00	99,91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.386.000,00	28.220.000,00	99,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.930.000,00	7.800.000,00	98,36
<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.980.620,00</b>	<b>9.980.620,00</b>	<b>100,00</b>
Pengembangan Bahan Pustaka	9.980.620,00	9.980.620,00	100,00
<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.085.512.552,00</b>	<b>8.453.592.500,00</b>	<b>83,82</b>
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.034.048.000,00	8.402.128.500,00	83,74
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	51.464.552,00	51.464.552,00	100,00



### BAB III

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

#### Laporan Realisasi Anggaran

#### Belanja

Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>14.314.322.941,00</b>	<b>12.631.321.779,00</b>	<b>3.303.852.794,00</b>

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2022 akun Belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dialokasikan sebesar Rp. 14.314.322.941,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 12.631.321.779,00 atau 88,24 %. Susunan Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022 dibagi atas Belanja Operasi sebagaimana dimuat dalam tabel berikut:

**Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021**

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
<b>BELANJA</b>	<b>14.314.322.941,00</b>	<b>12.631.321.779,00</b>	<b>88,24</b>	<b>3.303.852.794,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.345.564.321,00</b>	<b>4.297.028.679,00</b>	<b>98,88</b>	<b>3.278.852.794,00</b>
Belanja Pegawai	3.335.039.217,00	3.302.975.929,00	99,04	2.645.484.191,00
Belanja Barang dan Jasa	1.010.525.104,00	994.052.750,00	98,37	633.368.603,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9.968.758.620,00</b>	<b>8.334.293.100,00</b>	<b>83,60</b>	<b>25.000.000,00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.730.000,00	21.844.000,00	88,33	25.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.934.048.000,00	8.302.468.500,00	83,58	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.980.620,00	9.980.600,00	100,00	0,00

Adapun penjelasan anggaran dan realisasi Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

#### Belanja Operasi

Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>4.345.564.321,00</b>	<b>4.297.028.679,00</b>	<b>3.278.852.794,00</b>

Belanja Operasi diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang dan Jasa. Dalam Tahun Anggaran 2022 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 4.345.564.321,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp. 4.297.028.679,00 atau 98,88 %. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.278.852.794,00.

**Belanja Pegawai**

<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>3.335.039.217,00</b>	<b>3.302.975.929,00</b>	<b>2.645.484.191,00</b>

Belanja pegawai merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai yang penggunaannya adalah untuk gaji PNS, Tambahan penghasilan PNS, honorarium/upah PNS/Non PNS dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berasal dari jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai/Personalia dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam Tahun Anggaran 2022, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.335.039.217,00 realisasinya mencapai sebesar Rp. 3.302.975.929,00 atau sebesar 99,04%. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.645.484.191,00 sebagaimana dimuat dalam tabel berikut:

**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>%</b>
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.415.700.795,00	1.407.182.424,00	99,40
Belanja Tunjangan Keluarga	119.964.720,00	119.964.720,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan	133.910.000,00	133.910.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	42.665.000,00	42.480.000,00	99,57
Belanja Tunjangan Beras	81.834.600,00	81.834.600,00	100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.718.803,00	3.718.803,00	100,00
Belanja Pembulatan Gaji	20.989,00	20.861,00	99,39
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	58.076.711,00	58.076.711,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan	2.874.746,00	2.874.746,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian	8.624.378,00	8.624.378,00	100,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.409.748.475,00	1.386.388.686,00	98,34
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	57.900.000,00	57.900.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.335.039.217,00</b>	<b>3.302.975.929,00</b>	<b>99,04</b>

**Belanja Barang dan Jasa**

<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
<b>1.010.525.104,00</b>	<b>994.052.750,00</b>	<b>633.368.603,00</b>

Belanja barang dan jasa, belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan



pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, yang mencakup belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak pengadaan, sewa gedung, perlengkapan kantor, makan dan minum, pakaian dinas beserta atributnya dan perjalanan dinas.

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berasal dari jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam Tahun Anggaran 2022, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.010.525.104,00 dan realisasinya sebesar Rp. 994.052.750,00 atau sebesar 98,37%. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 633.368.603,00.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2022</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>%</b>
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	562.000,00	562.000,00	100,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	572.552,00	572.000,00	99,90
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	33.788.400,00	33.413.200,00	98,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.358.500,00	16.358.500,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.292.000,00	2.292.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.238.500,00	4.238.500,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10.026.052,00	10.000.000,00	99,74
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.499.400,00	2.499.400,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.640.000,00	15.640.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.524.000,00	4.524.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.050.000,00	8.050.000,00	100,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	367.200.000,00	367.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Belanja Tagihan Listrik	22.104.000,00	11.809.768,00	53,42
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.225.000,00	3.195.000,00	99,06
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.900.000,00	2.266.540,00	32,84
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	100.000.000,00	99.660.000,00	99,66
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	110.360.000,00	110.060.000,00	99,72
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	7.291.700,00	7.285.000,00	99,90
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7.930.000,00	7.800.000,00	98,36
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.386.000,00	28.220.000,00	99,41
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.952.000,00	104.806.842,00	99,86
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.625.000,00	33.600.000,00	99,92
<b>JUMLAH</b>	<b>1.010.525.104,00</b>	<b>994.052.750,00</b>	<b>98,37</b>



### Belanja Hibah

Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
0,00	0,00	0,00

Belanja hibah, belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, yang mencakup belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak pengadaan, sewa gedung, perlengkapan kantor, makan dan minum, pakaian dinas beserta atributnya dan perjalanan dinas.

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berasal dari jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam Tahun Anggaran 2022, Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan realisasinya sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 %. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00.

### Belanja Modal

Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
9.968.758.620,00	8.334.293.100,00	25.000.000,00

Belanja Modal dikelompokkan kedalam 5 (lima) belanja, yaitu : (1) Belanja Tanah, (2) Belanja Peralatan dan Mesin, (3) Belanja Bangunan dan Gedung, (4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan (5) Belanja Aset Tetap Lainnya.

Belanja modal merupakan pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau bangunan aset yang tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti : pembelian bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Pencatatan untuk perkiraan Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk kode rekening pengeluaran/pembelian Belanja Modal masing-masing beserta biaya lainnya yang terkait dalam rangka perolehan aset tersebut.



### Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
24.730.000,00	21.844.000,00	25.000.000,00

Dalam Tahun Anggaran 2022, Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 24.730.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 21.844.000,00 atau sebesar 88,33 %. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 25.000.000,00

### Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
9.934.048.000,00	8.302.468.500,00	0,00

Dalam Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 9.934.048.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 8.302.468.500,00 atau sebesar 83,58 %. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00

### Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
9.980.620,00	9.980.600,00	0,00

Dalam Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal Aset tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 9.980.620,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.980.600,00 atau sebesar 100,00 %. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00

## LAPORAN OPERASIONAL

### Beban

2022  
**Rp. 4.491.716.906,00**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban



transfer, dan beban tak terduga. Selama Tahun 2022 Beban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebesar Rp. 4.491.716.906,00.

**Beban Operasi**

**2022**  
**Rp. 4.491.716.906,00**

Beban Operasional diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) jenis belanja, yaitu: (1) Beban Pegawai, (2) Beban Barang dan Jasa (3) Beban Penyusutan (4) Beban Penyisihan Piutang dan (5) Beban Lain-Lain. Beban Operasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebesar Rp. 4.491.716.906,00 terdiri dari:

**Beban Operasional Tahun 2022**

URAIAN	LO 2022	LRA 2022	SELISIH
Beban Pegawai	3.302.975.929,00	3.302.975.929,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	995.981.617,00	994.052.750,00	1.928.867,00
Beban Penyusutan	192.759.360,00	0,00	192.759.360,00
<b>JUMLAH</b>	<b>4.491.716.906,00</b>	<b>4.297.028.679,00</b>	<b>194.688.227,00</b>

**Beban Pegawai**

**2022**  
**Rp. 3.302.975.929,00**

Beban pegawai merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk Beban Pegawai yang penggunaannya adalah untuk gaji PNS, Tambahan penghasilan PNS honorarium/upah PNS/Non PNS dalam melaksanakan program dan kegiatan. Beban Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 sebesar Rp. 3.302.975.929,00 sebagaimana dimuat dalam tabel berikut :

**Beban Pegawai Tahun 2022**

URAIAN	LO 2022	LRA 2022	SELISIH
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.407.182.424,00	1.407.182.424,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga	119.964.720,00	119.964.720,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan	133.910.000,00	133.910.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras	81.834.600,00	81.834.600,00	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.718.803,00	3.718.803,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji	20.861,00	20.861,00	0,00
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan	58.076.711,00	58.076.711,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan	2.874.746,00	2.874.746,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian	8.624.378,00	8.624.378,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.386.388.686,00	1.386.388.686,00	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.302.975.929,00</b>	<b>3.302.975.929,00</b>	<b>0,00</b>



## Beban Barang dan Jasa

**2022**  
**Rp. 995.981.617,00**

Beban ini bersumber dari pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beban Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp. 995.981.617,00 yang terdiri dari :

## Beban Barang dan Jasa

URAIAN	LO 2022	LRA 2022	SELISIH
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	562.000,00	562.000,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	572.000,00	572.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	33.328.067,00	33.413.200,00	-85.133,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.392.500,00	16.358.500,00	34.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.292.000,00	2.292.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.238.500,00	4.238.500,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.499.400,00	2.499.400,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.640.000,00	15.640.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.524.000,00	4.524.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00
Beban Persediaan Alat Rumah Tangga Lainnya	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	367.200.000,00	367.200.000,00	0,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Belanja Tagihan Listrik	11.809.768,00	11.809.768,00	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.266.540,00	2.266.540,00	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	99.660.000,00	99.660.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	110.060.000,00	110.060.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	7.285.000,00	7.285.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.220.000,00	28.220.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.806.842,00	104.806.842,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>995.981.617,00</b>	<b>994.052.750,00</b>	<b>1.928.867,00</b>

Dari masing-masing Belanja Barang dan jasa dari LRA terhadap Beban Barang dan Jasa dari Laporan Operasional ada selisih sebesar Rp. 1.928.867,00.



**Beban Penyusutan** 2022  
**Rp.192.759.360,00**

Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp. 192.759.360,00 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 138.908.500,00 dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 49.196.502,00 dan Beban Penyusutan Jalan sebesar Rp. 4.654.358,00.

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu.

**Ekuitas Awal** 2022  
**Rp. 3.147.072.213,00**

Ekuitas awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.147.072.213,00 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2021.

**Surplus / Defisit – LO** 2022  
**(Rp. 4.491.716.906,00)**

Tahun anggaran 2022 Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami defisit Tahun 2022 sebesar (Rp. 4.491.716.906,00) ini merupakan jumlah beban pada Laporan Operasional.

**Koreksi Ekuitas Lainnya** 2022  
**Rp.0,00**

Per 31 Desember 2022 koreksi ekuitas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebesar Rp.0,00. Koreksi ekuitas lainnya tersebut merupakan koreksi terhadap ekuitas pada laporan keuangan tahun 2021 akibat perubahan dari basis kas menuju akrual kepada basis akrual tahun 2022 antara lain karena penerapan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi yang mempengaruhi saldo awal aset tetap dan aset lain-lain (aset rusak berat),



**Ekuitas Akhir**

2022  
**Rp. 11.286.677.086,00**

Saldo ekuitas akhir tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 11.286.677.086,00 dan Rp. 3.147.072.213,00. Penyebab perbedaan saldo ekuitas tahun 2022 dari ekuitas tahun 2021 yang disebabkan karena pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai belum menerapkan kebijakan kapitalisasi dan penyusutan aset. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp. 3.147.072.213,00 ditambah surplus/defisit-LO sebesar (Rp. 4.491.716.906,00) ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 0,00.

**NERACA**

**Persediaan**

31 Desember 2022                      31 Desember 2021  
**Rp. 1.701.700,00**                              **Rp. 1.650.567,00**

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.701.700,00 merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Untuk memperbaiki kualitas manajemen persediaan pada akhir tahun, Persediaan sesuai pengelompokan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 sebagai berikut :

**Daftar Persediaan**

No.	Uraian	2022	2021
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.701.700,00	1.616.567,00
2	Persediaan Cetakan	0,00	34.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.701.700,00</b>	<b>1.650.567,00</b>

**Aset Tetap**

31 Desember 2022                      31 Desember 2021  
**Rp. 11.198.105.386,00**                              **Rp. 3.058.551.646,00**

Saldo awal Aset Tetap sebesar Rp. 11.198.105.386,00 merupakan saldo aset tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai per 31 Desember 2021. Pertambahan aset tetap selama Tahun 2022 berasal dari belanja modal Tahun 2022 dikurang reklasifikasi aset peralatan mesin akibat ekstrakompatabel.



**Aset Tetap**

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 31 Des 2022	Saldo Per 31 Des 2021	Kenaikan / Penurunan
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.672.219.202,00	1.652.355.202,00	19.864.000,00
Gedung dan Bangunan	1.392.692.000,00	1.392.692.000,00	0,00
Jalan,Irigasi dan Instalasi	93.087.050,00	93.087.050,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	1.654.340.483,00	1.644.359.883,00	9.980.600,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.302.468.500,00	0,00	8.302.468.500,00
Akumulasi Penyusutan	(1.916.701.849,00)	(1.723.942.489,00)	(192.759.360,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>11.198.105.386,00</b>	<b>3.058.551.646,00</b>	<b>8.139.553.740,00</b>

**Tanah**

**31 Desember 2022**  
**Rp.0,00**

**31 Desember 2021**  
**Rp.0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan, serta biaya pembelian yang berkaitan dengan pemilikan tanah tersebut. Saldo aset tetap tanah selama tahun 2022 Rp.0,00.

**Peralatan dan Mesin**

**31 Desember 2022**  
**Rp. 1.672.219.202,00**

**31 Desember 2021**  
**Rp. 1.652.355.202,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, yang meliputi harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.672.219.202,00.

**Gedung dan Bangunan**

**31 Desember 2022**  
**Rp. 1.392.692.000,00**

**31 Desember 2021**  
**Rp. 1.392.692.000,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 setelah inventarisasi dan mutasi tambah/kurang yang mencakup seluruh



biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap dipakai, meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi, meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.392.692.000,00.

<b>Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp.93.087.050,00</b>	<b>31 Desember 2021</b> <b>Rp.93.087.050,00</b>
--------------------------------------	--	--

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2022 setelah inventarisasi dan mutasi tambah/kurang yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Instalasi sampai siap pakai (tidak termasuk nilai tanah). Saldo Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2022 Rp.93.087.050,00.

<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp. 1.654.340.483,00</b>	<b>31 Desember 2021</b> <b>Rp. 1.644.359.883,00</b>
---------------------------	--	--

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 setelah inventarisasi dan mutasi tambah/kurang yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya sampai siap pakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.654.340.483,00.

<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp. 1.916.701.849,00)</b>
-----------------------------	--

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 terhadap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp. 1.416.061.202,00) dan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp. 461.872.419,00) dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar (Rp. 38.768.228,00).



Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dilakukan penghitungan penyusutan atas Aset Tetap yaitu Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sedangkan Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 dan Tahun 2022 yaitu :

**Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021**

NO	JENIS BUKU / ASET	PENYUSUTAN 2021	PENYUSUTAN 2022	BEBAN PENYUSUTAN 2022
1	PERALATAN DAN MESIN	1.277.152.702,00	1.416.061.202,00	138.908.500,00
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	412.675.917,00	461.872.419,00	49.196.502,00
3	JALAN NEGARA/NASIONAL	34.113.870,00	38.768.228,00	4.654.358,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.723.942.489,00</b>	<b>1.916.701.849,00</b>	<b>192.759.360,00</b>

**Informasi Lain Mengenai Aset**

Selain aset tetap dan aset lainnya, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga melakukan penatausahaan aset yang dicatat dalam Buku Inventaris Ekstrakomptabel.

Aset tetap yang tidak memenuhi nilai satuan minimum satuan kapitalisasi tidak disajikan pada neraca laporan keuangan namun dicatat dalam Buku Inventaris Ekstra Komptable yaitu Peralatan dan Mesin ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,00 sedangkan Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya dikecualikan dari penghitungan satuan minimum kapitalisasi. Selain itu, aset lainnya yaitu aset yang kondisinya rusak berat dan tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi juga dicatat dalam Buku Inventaris Ekstra Komptabel.

<b>Ekuitas</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
	<b>Rp. 11.286.677.086,00</b>	<b>Rp. 3.147.072.213,00</b>

Jumlah saldo ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.286.677.086,00.



---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022 yang menyajikan tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, dan merupakan satu kesatuan dari Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga nantinya dapat menimbulkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, dengan demikian pada akhirnya nanti akan tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kabupaten ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan dengan harapan kiranya para pengguna Laporan Keuangan dapat lebih memahami isi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022.

Perbaungan, 2023  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**ELINDA SITIANUR, SE**  
**NIP. 19670831 198903 2 002**